

Mobilisasi Politik Caleg Terpilih Pdi Perjuangan Pada Pemilihan UMUM Legislatif 2024 di Kota Kupang

Alexandro J. Ndapaduu Daepanie¹, Frans W. Muskanan², Rex Tiran³, Ananias R.P Jacob⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nusa Cendana Kupang
sandrodaepanie8@gmail.com

Abstract

Legislative elections constitute an essential mechanism in a democratic system for determining public representatives in legislative institutions. The success of legislative candidates in electoral contests is strongly influenced by the political mobilization strategies they employ. This study aims to analyze the political mobilization of elected legislative candidates from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) in the 2024 Legislative Election in Kupang City. This research adopts a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The main informants consisted of five elected legislative candidates from PDI Perjuangan and voters in their respective electoral districts. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques, guided by Stevano Bartolini's theory of political mobilization. The findings indicate that the electoral success of PDI Perjuangan candidates was influenced by effective political mobilization strategies, including mass mobilization, the utilization of economic resources, and symbolic mobilization. These strategies were implemented through both direct mobilization such as face-to-face socialization and campaign activities, and indirect mobilization through social media and local political networks. Structured and network-based political mobilization played a crucial role in securing voter support.

Keywords: Political Mobilization, Legislative Candidates, PDI Perjuangan, 2024 Legislative Election, Kupang City.

Abstrak

Pemilihan Umum Legislatif merupakan sarana penting dalam demokrasi untuk menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif. Keberhasilan calon legislatif dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh strategi mobilisasi politik yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mobilisasi politik calon legislatif terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan utama lima calon legislatif terpilih PDI Perjuangan serta masyarakat pemilih. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori mobilisasi politik Stevano Bartolini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan caleg PDI Perjuangan dipengaruhi oleh mobilisasi politik yang efektif melalui mobilisasi massa, pemanfaatan sumber daya ekonomi, dan mobilisasi simbolik. Strategi tersebut dilakukan baik secara langsung melalui sosialisasi dan kampanye tatap muka, maupun secara tidak langsung melalui media sosial dan jaringan politik lokal. Mobilisasi politik yang terstruktur dan berbasis jaringan sosial menjadi faktor utama dalam memenangkan dukungan pemilih.

Kata Kunci: Mobilisasi Politik, Calon Legislatif, PDI Perjuangan, Pemilu Legislatif 2024, Kota Kupang.

Copyright (c) 2026 Alexandro J. Ndapaduu Daepanie, Frans W. Muskanan, Rex Tiran, Ananias R.P Jacob

✉ Corresponding author: Alexandro J. Ndapaduu Daepanie

Email Address: sandrodaepanie8@gmail.com (Universitas Nusa Cendana Kupang)

Received 01 April 2025, Accepted 10 April 2026, Published 21 April 2026

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Legislatif merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan pembangunan melalui pemilihan wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Pemilih memiliki kebebasan menentukan figur yang dianggap layak merepresentasikan aspirasi mereka (Rahmayanti, 2009:1). Selain itu, pemilu berfungsi sebagai mekanisme evaluasi pemerintahan, sekaligus membuka peluang terjadinya sirkulasi kekuasaan secara demokratis (Triono, 2017:156). Dalam praktiknya, kontestasi elektoral di Indonesia tidak hanya

mengandalkan partai politik sebagai instrumen utama. Penelitian Feith dan Liddle menunjukkan bahwa kekuatan politik sering kali digerakkan melalui instrumen non-partai seperti ketokohan, birokrasi, jaringan identitas, dan organisasi sosial (Hasanudin, 2017:54). Munculnya organisasi kemasyarakatan, komunitas, dan kelompok kepentingan menunjukkan berkembangnya demokratisasi serta lahirnya basis massa baru yang menjadi ruang mobilisasi politik (Susanti, 2015:181). Mobilisasi politik menjadi instrumen strategis dalam memenangkan pemilu. Para kandidat memanfaatkan jaringan sosial, hubungan patronase, serta basis kultural untuk mempengaruhi preferensi pemilih (Umamah, 2019). Agusyanto membagi bentuk jaringan politik ke dalam tiga tipe: jaringan kepentingan, jaringan emosional, dan jaringan kekuasaan, yang seluruhnya relevan dalam proses kontestasi politik lokal (Umamah, 2019:117).

Sebagai partai besar yang memiliki struktur organisasi hingga akar rumput, PDI Perjuangan konsisten memainkan peran penting dalam perpolitikan lokal. Studi Aspinall dan Sukmajati (2015) menegaskan bahwa partai dengan jejaring sosial yang aktif lebih unggul dalam kompetisi elektoral, terutama pada tingkat lokal. Mobilisasi melalui kedekatan personal, patronase, jaringan kekerabatan, bantuan sosial, dan isu-isu lokal menjadi strategi yang lazim digunakan. Dalam konteks Kota Kupang, Pemilu Legislatif 2024 diikuti 631 calon legislatif dari 18 partai politik, memperebutkan 40 kursi pada lima daerah pemilihan. PDI Perjuangan mempertahankan 5 kursi yang sama dengan hasil Pemilu 2019. Terdapat tiga petahana yang berhasil mempertahankan kursinya—Yeskiel Loudoe, Dominika W. Bethan, dan Barche B.R. Bastian—menunjukkan kekuatan basis dukungan dan jaringan politik yang stabil. Selain itu, terdapat regenerasi melalui dua wajah baru, yakni Victor A.Y. Dimoe Heo dan Salomon A.F. Pellokila. Stabilitas perolehan kursi PDIP mengindikasikan keberhasilan strategi mobilisasi, baik melalui jaringan partai maupun personal caleg. Keberhasilan ini juga memperlihatkan dinamika identitas politik dan relasi sosial dalam masyarakat Kota Kupang. Di sisi lain, kontestasi juga menunjukkan tantangan representasi perempuan. Studi Bennett (2006) menegaskan bahwa perempuan memiliki hambatan dalam mengakses sumber daya politik dan jaringan sosial yang dominan dikuasai laki-laki. Keberhasilan caleg perempuan PDIP seperti Dominika W. Bethan menjadi indikator menarik dari keberhasilan mobilisasi berbasis gender dalam struktur politik lokal.

Strategi mobilisasi politik caleg PDIP terlihat dalam dua bentuk:

1. Mobilisasi langsung, melalui sosialisasi tatap muka dan pengarahan pilihan kepada pemilih; dan
2. Mobilisasi tidak langsung, melalui kampanye digital, peran tim relawan, dan penggunaan jaringan sosial.

Berangkat dari fenomena tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana strategi mobilisasi politik yang dilakukan caleg PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Kupang, serta sejauh mana jejaring sosial, modal politik, dan dinamika sosial-budaya mempengaruhi perilaku pemilih. Penelitian ini memfokuskan kajian pada lima caleg PDIP yang terpilih—Victor A.Y. Dimoe Heo, Dominika W. Bethan, Salomon A.F. Pellokila, Barche B.R. Bastian, dan Yeskiel Loudoe—dengan

menggunakan perspektif teori mobilisasi politik Stevano Bartolini untuk memahami mekanisme mobilisasi serta pengaruhnya terhadap hasil elektoral.

Penelitian mengenai mobilisasi politik caleg terpilih PDI Perjuangan pada pemilihan umum legislatif telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan konteks yang berbeda. Beberapa penelitian empiris yang relevan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akhmad Syauqi Widodo (2024)

“Perubahan Pemasaran Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Dapil Banten III Tangerang Raya.”

Penelitian ini mengkaji penyebab penurunan suara PDI Perjuangan di Tangerang Raya pada Pemilu 2024. Dengan menggunakan konsep pemasaran politik—push marketing, pull marketing, dan pass marketing—Syuqi menemukan bahwa dinamika politik lokal dan konflik internal, termasuk ketegangan hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi, berdampak langsung pada strategi pemasaran dan menurunkan efektivitas kampanye partai. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan studi pustaka. Perbedaan penelitian ialah penelitian Widodo menyoroti penurunan perolehan suara PDIP dan fokus pada strategi pemasaran politik di Tangerang Raya. Sementara penelitian penulis meneliti mobilisasi politik caleg terpilih di Kota Kupang yang justru mempertahankan kemenangan 5 kursi DPRD. Fokus penulis bukan pada penurunan suara, tetapi pada mekanisme mobilisasi yang menghasilkan keberhasilan elektoral.

Syaira Alifia Athalla Meiliaputri & Siti Witianti (2024)

“Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Komunikasi Politik melalui Media Sosial pada Pemilihan Legislatif 2024.”

Penelitian ini menelaah penggunaan media sosial oleh PDIP sebagai strategi komunikasi dalam Pemilu 2024. Menggunakan teori komunikasi politik dan media digital dalam kampanye, peneliti mendapati bahwa PDIP memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk meningkatkan visibilitas dan memperluas jangkauan pemilih. Strategi berbasis interaksi digital dinilai berhasil memperkuat citra partai dan memengaruhi persepsi publik. Perbedaan penelitian ialah kedua penelitian sama-sama mencermati momentum Pileg 2024, namun penelitian penulis memperluas fokus terhadap dua bentuk mobilisasi politik, yaitu: Mobilisasi langsung – pengarahannya dan tatap muka dengan pemilih, Mobilisasi tidak langsung kampanye melalui media sosial dan jejaring komunitas. Selain itu, penulis menggunakan teori Mobilisasi Politik Stevano Bartolini, bukan teori komunikasi politik.

Resta Konitjarani dkk. (2020)

“Upaya PDIP dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Pileg 2014 DPC PDIP Kota Surakarta).”

Penelitian ini menguraikan strategi PDIP dalam memenuhi kuota 30% perempuan, meliputi kaderisasi, rekrutmen internal, pendidikan politik perempuan, penempatan perempuan dalam kepengurusan, dan pendampingan caleg pada kampanye. Fokus penelitian lebih menekankan proses internal organisasi partai dan pembentukan sumber daya politik perempuan.

Perbedaan penelitian ialah konitiarani berfokus pada kebijakan rekrutmen dan penguatan struktur internal partai dalam memenuhi kuota perempuan legislatif. Sebaliknya, penelitian penulis menilai mobilisasi caleg yang telah terpilih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam memobilisasi dukungan pemilih di Kota Kupang.

Lamabelawa (2020)

“Jaringan Sosial dan Mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati Flores Timur Tahun 2017.”

Lamabelawa menegaskan bahwa hubungan jaringan sosial kandidat dan partai menjadi faktor kunci keberhasilan kemenangan Pilkada di Flores Timur. Jaringan sosial mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan partisipasi pemilih melalui proses mobilisasi yang terstruktur. Perbedaan penelitian ialah Lamabelawa meneliti mobilisasi masyarakat dalam konteks Pilkada oleh pasangan calon di Flores Timur. Sementara penelitian penulis berfokus pada bagaimana caleg terpilih memobilisasi jaringan pemilih dalam pemilu legislatif dan dilakukan pada konteks Kota Kupang.

Posisi Penelitian

Berdasarkan kajian empiris di atas, penelitian ini menempati ruang baru dalam studi politik lokal, yaitu: Mengkaji mobilisasi politik bukan dari sisi partai ataupun pemilih, tetapi strategi caleg terpilih dalam menggalang dukungan, Difokuskan pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Kupang, wilayah yang memperlihatkan stabilitas perolehan kursi PDIP, Menggunakan teori mobilisasi politik Stevano Bartolini untuk menguraikan praktik mobilisasi langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemetaan peran individu caleg dalam memenangkan suara partai pada arena elektoral lokal.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dll, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati.

Jenis penelitian yang dilakukan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dimana peneliti melakukan penelitian mobilisasi politik caleg terpilih PDI perjuangan pada pemilihan umum legeslatif 2024 di kota Kupang.

HASIL DAN DISKUSI

Mobilisasi Modal Sosial yang Dilakukan oleh Caleg Terpilih PDI Perjuangan

Mobilisasi modal sosial merujuk pada pemanfaatan jaringan hubungan, kepercayaan, dan interaksi sosial yang dimiliki kandidat untuk menggalang dukungan politik. Dalam perspektif Bartolini, modal sosial dapat menjadi penentu efektivitas mobilisasi massa karena hubungan sosial yang kuat

menciptakan loyalitas, keterikatan, dan legitimasi moral di mata pemilih. Berikut adalah hasil wawancara mengenai pemanfaatan jaringan sosial oleh para caleg terpilih PDI Perjuangan: Hasil wawancara bersama Bapak Victor A.Y. Dimoe Heo

(24 Juni 2025)

“Saya ini tidak datang saat musim kampanye saja. Saya sudah terlibat dalam kegiatan warga sejak lama, dari urusan pemuda gereja, kegiatan olahraga, sampai urusan bantuan sosial. Jadi waktu saya maju, warga sudah kenal saya duluan. Mereka dukung bukan karena saya caleg, tapi karena mereka tahu selama ini saya ada untuk mereka.”

Analisis:

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa Victor memanfaatkan modal sosial berbasis kedekatan jangka panjang. Ia membangun reputasi melalui keterlibatan rutin dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan komunitas. Dukungan yang ia peroleh bukan hasil pendekatan tiba-tiba, tetapi berkembang dari kepercayaan masyarakat yang telah mengenalnya sebagai figur yang hadir sebelum masa kampanye. Strategi ini memperlihatkan pola *embedded social mobilization*, yakni pemanfaatan hubungan sosial yang sudah melekat dalam komunitas sebagai sumber dukungan politik.

Hasil wawancara bersama Ibu Dominika W. Bethan (24 Juni 2025)

“Saya sudah lama bekerja dengan ibu-ibu PKK dan komunitas gereja. Jadi jaringan itu bukan baru saya bangun saat mau kampanye. Mereka tahu saya dan saya tahu mereka. Makanya saat saya minta dukungan, itu seperti minta bantuan keluarga sendiri.”

Analisis:

Wawancara tersebut menegaskan bahwa Dominika memanfaatkan jaringan sosial berbasis komunitas perempuan dan gereja. Relasinya dibangun melalui kegiatan rutin dan interaksi sosial yang menciptakan ikatan emosional yang kuat. Kedekatan semacam ini menghasilkan dukungan organik yang tidak bersifat transaksional. Dalam kerangka Bartolini, strategi ini termasuk *community-based mobilization*, di mana solidaritas kelompok menjadi jembatan untuk menggalang dukungan elektoral.

Hasil wawancara bersama Bapak Barche B.R. Bastian (24 Juni 2025)

“Saya tidak punya organisasi pendukung, tapi saya punya keluarga besar. Dari dulu hubungan kami dengan tetangga dan masyarakat sekitar itu dekat. Kami sering bantu kalau ada duka atau acara komunal. Itu yang saya bawa, bukan organisasi, tapi hubungan kekeluargaan.”

Analisis:

Wawancara ini menunjukkan bahwa Barche bertumpu pada modal sosial berbasis kekerabatan. Keluarga besar menjadi pusat jaringan distribusi dukungan, dan hubungan kekeluargaan diperluas ke komunitas sekitar melalui interaksi sosial sehari-hari. Model ini merupakan bentuk *kinship social mobilization*, yang lazim muncul di daerah urban berkarakter sosial komunal seperti Kecamatan Alak. Kepercayaan publik dibangun melalui kedekatan personal, bukan formalitas organisasi.

Hasil wawancara bersama Bapak Salomon A.F. Pellokila (24 Juni 2025)

“Sebagai pengurus partai, jaringan saya di masyarakat sudah terbentuk. Saya terlibat dalam urusan warga lewat partai, bukan hanya saat kampanye. Jadi jaringan saya itu campuran, ada jaringan partai, ada jaringan sosial biasa.”

Analisis:

Wawancara tersebut menempatkan Salomon sebagai aktor yang memiliki dua lapis modal sosial yaitu jaringan sosial internal partai, dan jaringan sosial komunitas non-partisan.

Kombinasi ini memberikan fleksibilitas dan legitimasi dalam mobilisasi elektoral. Dalam teori Bartolini, pola semacam ini merupakan bentuk *institutionalized social mobilization*, di mana struktur partai menjadi kendaraan penguatan hubungan sosial yang telah ada. Hasil wawancara bersama Bapak Yeskiel Loudoe (24 Juni 2025)

“Saya sudah lama menjabat, jadi hubungan saya dengan masyarakat sudah terbentuk. Banyak komunitas yang merasa punya ikatan dengan saya karena kami sudah bekerja bersama bertahun-tahun. Kampanye kemarin tinggal meneruskan hubungan itu.”

Analisis:

Wawancara ini memperlihatkan keunggulan modal sosial seorang petahana (*incumbent*). Yeskiel tidak perlu membangun jaringan baru karena telah memiliki hubungan mapan yang terbentuk selama menjabat. Kepercayaan publik yang terbentuk ini menjadi modal sosial yang dapat langsung dikonversi menjadi dukungan elektoral. Pola ini sesuai dengan kategori *incumbent advantage social mobilization*, di mana pengalaman menjabat meningkatkan efektivitas jaringan sosial yang telah ada.

Mobilisasi Identitas Politik Para Caleg PDI Perjuangan

Berdasarkan rangkaian wawancara dengan lima caleg terpilih dan masyarakat dari berbagai dapil, terlihat jelas bahwa mobilisasi identitas politik yang dilakukan memiliki karakter yang unik dan konsisten, serta berbeda dari pola *patronage* identitas tradisional yang biasanya mengandalkan agama, etnis, ataupun tokoh adat. Seluruh caleg menyatakan bahwa simbol nomor urut tiga yang ditampilkan dalam bentuk gestur metal menjadi elemen pemersatu kampanye. Pola seragam ini mengindikasikan bahwa PDI Perjuangan secara internal mampu membangun identitas visual yang sederhana namun efektif, sehingga masyarakat langsung mengaitkan simbol tersebut dengan kandidat partai. Simbol ini menjadi representasi pilihan, bukan sekadar angka, karena ditopang oleh aktivitas lapangan dan kehadiran caleg di masyarakat. Temuan wawancara menunjukkan bahwa kelima caleg menghindari penggunaan identitas berbasis agama, budaya, maupun tokoh agama bukan karena tidak tersedia, tetapi karena mereka secara sadar memilih strategi politik yang lebih inklusif. Pendekatan ini menunjukkan kematangan strategi demokrasi lokal—bahwa dukungan tidak harus dibangun di atas garis pemisah kelompok, melainkan pada relasi yang setara dengan warga sebagai pemilih. Narasi para caleg menekankan bahwa identitas politik mereka dibangun melalui bentuk partisipasi langsung seperti hadir dalam kegiatan sosial, menjaga komunikasi harian, menjadi bagian dari dinamika komunitas, dan memperlihatkan kepedulian lewat kontribusi yang nyata. Dengan kata lain, simbol kampanye yang digunakan bukanlah identitas inti, tetapi pintu masuk untuk memfasilitasi hubungan dan keterikatan

antara kandidat dan warga. Wawancara masyarakat memperkuat perspektif tersebut. Warga tidak hanya melihat simbol sebagai elemen kampanye visual, tetapi memahami bahwa identitas caleg juga dibentuk dari tindakan mereka—membantu kegiatan olahraga, membagikan kebutuhan dasar, dan menyapa masyarakat dari rumah ke rumah. Hal ini menggeser makna identitas politik, dari yang bersifat simbolik menjadi bentuk representasi moral dan sosial. Tiga bentuk mobilisasi yang dipahami masyarakat—manusia, simbolik, dan finansial—bersatu membentuk identitas politik caleg yang meyakinkan. Mobilisasi manusia membangun kepercayaan lewat dialog, mobilisasi simbolik menegaskan keberadaan di ruang publik, dan mobilisasi finansial memperlihatkan kepedulian yang dapat dirasakan langsung. Ketiganya bekerja simultan, menciptakan narasi bahwa para caleg bukan saja meminta suara, tetapi menunjukkan posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat yang mereka wakili. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identitas politik yang terbentuk dari kelima caleg ini bersifat: Aspiratif, karena menyampaikan simbol yang mengikat pemilih dalam satu arah pilihan dan Relasional, karena dibangun melalui interaksi sosial yang berulang. Kontekstual, karena muncul dari kebutuhan dan keseharian warga; dan Bersifat kerja nyata, bukan warisan identitas budaya atau agama.

Model mobilisasi ini menunjukkan transformasi praktik kampanye di tingkat lokal dari politik identitas berbasis komunitas primordial menuju identitas elektoral berbasis kedekatan sosial dan persepsi kerja nyata. Strategi tersebut terbukti efektif karena kelima caleg berhasil memenangkan kursi legislatif, menegaskan bahwa identitas politik yang dibangun melalui pengalaman dan hubungan sosial dapat menjadi kekuatan baru dalam dinamika politik lokal di Kabupaten Kupang.

Analisis Umum Pola Mobilisasi Caleg Terpilih PDI Perjuangan Kota Kupang

Berdasarkan uraian tiga bentuk mobilisasi—manusia, ekonomi, dan identitas politik—yang dilakukan oleh caleg terpilih PDI Perjuangan, terlihat bahwa strategi kampanye yang dijalankan para aktor politik ini memiliki pola yang konsisten dan sangat relevan dengan kerangka pikir teori mobilisasi Stevano Bartolini. Penelitian ini menunjukkan bahwa mobilisasi bukan hanya proses teknis persiapan kampanye, tetapi merupakan dinamika politik yang bersifat sosial, struktural, dan simbolik, yang bertumpu pada pengorganisasian jejaring, aktivasi identitas, serta pemanfaatan sumber daya dalam konteks relasi sosial sehari-hari.

1. Mobilisasi Manusia: Variatif, Adaptif, Berbasis Relasi

Temuan memperlihatkan bahwa para caleg memobilisasi massa melalui tiga model utama yaitu Jaringan alami (dukungan lahir dari hubungan emosional dan relasi sosial yang sudah ada), Relawan terorganisir (basis pendukung lama yang berfungsi sebagai mesin kampanye), Struktur formal partai dan organisasi kemasyarakatan (mobilisasi sistematis dan berlapis). Kontestasi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pola tunggal mobilisasi yang lebih unggul; efektivitasnya bergantung pada modal sosial kandidat dan struktur relasi yang telah dibangun sebelum masa kampanye. Mobilisasi manusia tetap menjadi inti dari praktik pemenangan, karena menciptakan kedekatan yang membuka ruang pembentukan kepercayaan politik secara langsung.

2. Mobilisasi Ekonomi: Jaringan Sosial Sebagai Sumber Utama

Analisis sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa bantuan keluarga dan simpatisan, Kontribusi komunitas keagamaan, Dukungan relasi bisnis dan profesional, Fasilitasi dari jaringan petahana, menjadi mekanisme nyata bagaimana biaya kampanye disebarkan ke dalam komunitas, bukan ditanggung secara individual. Hal ini menegaskan pandangan Bartolini bahwa kampanye adalah proses kolektif yang memobilisasi modal sosial menjadi modal ekonomi. Akan tetapi, penelitian ini juga memberi ruang untuk kritik normatif: semakin tinggi ketergantungan pada jejaring ekonomi-politik, semakin besar potensi hubungan patronase yang terbentuk pasca pemilu, terutama bagi petahana. Dengan demikian, mobilisasi finansial tidak sekadar persoalan uang, tetapi merupakan refleksi kekuatan jaringan sosial yang telah lama tertanam dalam kehidupan kandidat dan masyarakat.

3. Mobilisasi Identitas Politik: Simbol Moderat, Kedekatan Sosial Dominan.

Para caleg menggunakan simbol politik sebagai pemersatu pilihan—dalam hal ini nomor urut tiga (metal)—yang menandai identitas elektoral PDI Perjuangan secara konsisten. Penggunaan baliho, spanduk, stiker, serta media digital memperlihatkan bahwa mobilisasi identitas tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berjalan berdampingan dengan mobilisasi tidak langsung. Keputusan untuk tidak menggunakan identitas-etnis, keagamaan, ataupun budaya merupakan temuan penting penelitian ini. Hal tersebut menandakan pergeseran dari politik identitas primordial menuju identitas programatik dan simbolik yang lebih adaptif terhadap kontestasi modern. Identitas politik PDI Perjuangan di Kota Kupang dibangun bukan melalui batasan kelompok, tetapi melalui hadirnya politisi di tengah masyarakat, aksi bantuan sosial, keterlibatan rutin, dan komunikasi interpersonal. Dengan kata lain, simbol metal hanya menjadi pintu gerbang yang memperkuat citra, sedangkan legitimasi utama caleg dibangun melalui praktik sosial yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Secara keseluruhan, strategi caleg PDI Perjuangan di Kota Kupang menunjukkan bahwa keberhasilan kampanye legislatif tidak hanya ditentukan oleh modal finansial, simbol partai, atau instrumen komunikasi, tetapi oleh kemampuan kandidat mengaktifkan modal sosial, membangun kehadiran politik berkelanjutan, dan menjaga hubungan timbal balik yang bermakna dengan masyarakat. Temuan ini menegaskan lima poin kunci:

1. Modal sosial lebih menentukan daripada modal ekonomi.

Kampanye tetap dapat berjalan efektif walau dengan biaya terbatas, jika kandidat mempunyai jaringan yang loyal.

2. Simbol politik kuat hanya jika ditopang tindakan nyata.

Metal dan nomor tiga menjadi identitas karena disertai aktivitas lapangan yang rutin.

3. Variasi strategi mencerminkan kesetaraan peluang internal partai.

Kandidat tanpa relawan besar tetap berpeluang menang dengan memaksimalkan keluarga dan relasi sehari-hari.

4. Mobilisasi politik bersifat embedded

Kampanye tidak terpisah dari kehidupan sosial warga—ia menyatu dalam kegiatan sosial, gereja, komunitas olahraga, dan kerja profesional.

5. Demokrasi lokal bergerak menuju basis rasional-instrumental, bukan identitas primordial.

Pembatasan eksploitasi agama/suku menunjukkan etika politik yang berkembang pada level lokal.

Dengan demikian, pola mobilisasi caleg terpilih PDI Perjuangan di Kota Kupang merepresentasikan praktik demokrasi elektoral yang tumbuh dari interaksi sosial, modal jaringan, dan simbol politik yang diolah secara dinamis sesuai kebutuhan dan konteks masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi mobilisasi politik lima calon legislatif PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa pola mobilisasi yang mereka lakukan berjalan melalui tiga bentuk utama sesuai konsep Stefano Bartolini, yaitu mobilisasi manusia, mobilisasi finansial, dan mobilisasi simbolik. Ketiga bentuk mobilisasi ini saling berkaitan dan membentuk fondasi keberhasilan elektoral masing-masing calon. Mobilisasi manusia merupakan aspek yang paling menonjol dan menjadi kekuatan inti dalam strategi kemenangan para caleg. Pendekatan ini diwujudkan melalui metode door to door, relawan keluarga, relawan yang sudah terbentuk sejak periode sebelumnya, serta aktivasi struktur partai yang telah mapan. Interaksi tatap muka terbukti efektif dalam membangun kedekatan emosional, kepercayaan, dan hubungan komunikatif yang berkelanjutan dengan pemilih. Seluruh caleg memanfaatkan jaringan sosial yang telah ada, baik berupa hubungan kekeluargaan, komunitas lokal, maupun jejaring partai. Pola tersebut menggambarkan mobilisasi langsung (*direct mobilization*) sebagaimana dijelaskan oleh Bartolini. Mobilisasi finansial menunjukkan bahwa pembiayaan kampanye tidak hanya bergantung pada dana pribadi, tetapi juga diperkuat oleh dukungan eksternal yang bersumber dari jaringan sosial kandidat. Dukungan yang diterima para caleg berupa barang, konsumsi kegiatan, tenaga sukarela, fasilitas kendaraan, jasa pemasangan baliho, hingga peminjaman alat kampanye. Kontribusi tersebut memiliki nilai ekonomi nyata dan menggambarkan pola *collective financial mobilization* serta *grassroots economic mobilization* dua konsep inti Bartolini yang menekankan bahwa sumber daya ekonomi kampanye sering kali berasal dari solidaritas komunitas sekitar kandidat. Bagi petahana, mobilisasi finansial eksternal lebih kuat karena mereka memiliki akses jaringan ekonomi-politik yang lebih luas dan telah terbangun selama bertahun-tahun.

Mobilisasi simbolik dilakukan melalui penggunaan simbol nomor urut tiga yang ditampilkan dalam bentuk metal sebagai identitas politik yang mudah dikenali. Para caleg memilih untuk tidak memanfaatkan identitas budaya, agama, maupun tokoh agama sebagai strategi komunikasi. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan simbol visual seperti baliho, spanduk, dan brosur sebagai sarana utama untuk memperkuat citra diri. Walaupun seluruh caleg juga memanfaatkan media sosial, alat peraga kampanye fisik tetap dianggap memiliki pengaruh besar di lapangan karena sesuai dengan karakteristik komunikasi masyarakat Kota Kupang.

Keberhasilan para caleg tidak hanya ditentukan oleh upaya kampanye selama masa pemilu, tetapi juga oleh kekuatan jaringan sosial, konsistensi kehadiran, dan rekam jejak hubungan dengan masyarakat. Kandidat baru lebih banyak mengandalkan relasi keluarga, gereja, dan komunitas lingkungan, sementara petahana mengaktifkan jaringan politik-ekonomi yang telah terinstitusionalisasi. Dengan demikian, mobilisasi politik tidak bersifat instan, melainkan merupakan hasil akumulasi relasi sosial yang telah terbangun secara terus-menerus.

Efektivitas mobilisasi politik PDI Perjuangan di Kota Kupang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: Kekuatan jaringan sosial dan kekerabatan, yang menciptakan loyalitas politik berbasis hubungan sosial. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Sidel (2019) yang menyebutkan bahwa politik lokal di Indonesia masih didominasi oleh local strongmen dan jaringan patron-klien yang berperan besar dalam menentukan hasil pemilu. Ketersediaan modal finansial, yang menentukan sejauh mana kegiatan kampanye dapat dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kedekatan personal dengan masyarakat, yang membangun rasa kepercayaan dan keterikatan emosional antara caleg dan pemilih. Ketokohan dan pengalaman politik, terutama bagi caleg petahana seperti Yeskiel Loudoe dan Barche B.R. Bastian, yang memiliki legitimasi sosial dan kredibilitas politik yang tinggi di wilayahnya. Faktor-faktor ini memperkuat konsep politik relasional (relational politics) sebagaimana dijelaskan oleh Heller (2013), bahwa keberhasilan politik lokal ditentukan oleh jaringan sosial dan kepercayaan yang dibangun secara personal antara pemimpin politik dan warga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mobilisasi politik para caleg PDI Perjuangan di Kota Kupang merupakan integrasi antara interaksi langsung dengan pemilih, dukungan ekonomi kolektif, dan komunikasi simbolik yang terarah. Temuan ini sepenuhnya konsisten dengan model mobilisasi Stevano Bartolini, yang memandang mobilisasi politik sebagai proses aktivasi sumber daya sosial, ekonomi, dan simbolik dalam konteks persaingan elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364.
- Berkes, F., & Folke, C. (1998). *Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Durkheim, É. (1893). *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press.
- Faisal, S. (2010). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moehar. (2002). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.

- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, Politics and the State*. London: Macmillan.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Haryanto, S. (2018). Mobilisasi Politik Lokal dalam Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(2), 88–104.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization. *Party Politics*, 1(1), 5–28.
- Konitjarani, R., dkk. (2020). Upaya PDIP dalam Memenuhi Kuota Caleg Perempuan. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(1).
- Lamabelawa, Y. (2020). Jaringan Sosial dan Mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati Flores Timur 2017. *Jurnal Politik Lokal*, 8(2).
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636–657. (referensi tambahan)
- Lim, M. (2017). Digital Activism and Political Change in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 47(3), 371–394.
- Mietzner, M. (2018). Indonesia's Democratic Regression. *Journal of Democracy*, 29(4), 102–116.
- Norris, P. (2005). Campaign Communications. *Political Communication*, 22(3), 297–314.
- Rahmayanti, D. R. (2009). Pendidikan Politik Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik*, 1(1), 1.
- Slater, D., & Simmons, J. (2010). Informal Institutions and Electoral Politics in Southeast Asia. *Journal of East Asian Studies*, 10(1), 35–62. (referensi tambahan)
- Susanti, R. (2015). Organisasi Kemasyarakatan dan Dinamika Politik Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2), 178–185.
- Umamah, N. (2019). Struktur Jaringan dan Mobilisasi Politik di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Politik*, 5(1), 112–120.
- Athalla Meiliaputri, S. A., & Witrianti, S. (2024). Strategi PDIP dalam Komunikasi Politik Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Legislatif 2024. Skripsi.
- Widodo, A. S. (2024). Perubahan Pemasaran Politik PDIP pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil Banten III. Skripsi.

- BRIN. (2023). Tren Mobilisasi Politik Lokal di Indonesia. <https://brin.go.id>
- KPU RI. (2024). Peraturan & Informasi Pemilu. <https://kpu.go.id>
- Merriam Webster. (2023). Political Definition. <https://merriam-webster.com>
- PDIP. (2024). Profil & Struktur Organisasi. <https://pdiperjuangan.id>
- The Conversation Indonesia. (2022). Politik Patronase di Indonesia. <https://theconversation.com/id>
- Tirto.id. (2023). Branding dan Simbol Politik Caleg. <https://tirto.id>
- E. Peraturan Perundang-Undangan
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2022). Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Perikanan.
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penetapan Desa Tablolong.
- Surat Nomor 140/1253/POUD tanggal 06 Mei 1999 tentang Administrasi Pemerintahan Desa Tablolong.